

Gerakan Lawan Politik Uang

TEMON (KR) -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di tingkat lokal. Namun jika di event pilkada marak politik uang, akan menggerus daulat rakyat dalam menentukan pemimpin.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto SSos MSI pada acara Membangun Kesadaran Bersama untuk Tolak dan Lawan Politik Uang.

"Tugas Bawaslu mengawal daulat rakyat, menjaga kemurnian suara pemilihan, sejak didaftarkan di Daftar Pemilih Tambahan (DPT),



KR-Widiastuti

Marwanto.

saat memberikan suara di TPS, sampai dihitung dan direkap suaranya. Namun itu baru dalam tataran teknis prosedural," ujar Marwanto ketika dihubungi Rabu (13/11).

Padahal, lanjut Marwanto, tugas Bawaslu tak hanya urusan teknis prosedural, tapi juga kemurnian suara substantif. Apakah ketika pemilihan datang ke TPS dan menentukan pilihannya itu datang dari pikiran jernihnya, dari pertimbangan yang bijak, atau hanya karena iming-iming yang bersifat pragmatis belaka.

"Jika memilih mencoblos hanya berdasarkan amplop yang diterima, yang berdaulat adalah uang, bukan rakyat! Mari bersama mewujudkan pilkada bersih dengan memerangi politik uang demi tegaknya daulat rakyat," tegas Marwanto. (Wid)

KORBAN TERSERET OMBAK PANTAI JOGAN 2 Hari dalam Pencarian Belum Ditemukan

WONOSARI (KR) -Meskipun sudah dilakukan pencarian selama dua hari melibatkan SAR Satlinmas Wilayah I-II, Basarnas, TNI/Polri, tetapi korban terseret ombak Pantai Jogan, Purwodadi, Tepus Gunungkidul, Sukirin (25) belum ditemukan keberadaannya.

Koordinator SAR Satlinmas Wilayah I Gunungkidul, Sunu Handoko Bayu Sagara SIP mengatakan pencarian hingga pukul 15.30 WIB belum membuahkan hasil. "Kami akan terus lanjutkan pencarian dengan melibatkan Basarnas," katanya, Rabu (13/11)

Tim operasi pada hari kedua pencarian dibagi menjadi dua, meliputi penyisiran darat dan laut. Tim Darat akan dibagi menjadi tiga SRU. SRU I memantau dari tempat kejadian atau Tebing Congor, SRU II memantau dari sekitar Pantai Nglambor, dan SRU III memantau dari Tebing Muncar.

Adapun Tim Laut akan menggunakan tiga perahu. Penyisiran dilakukan di tiga

titik. Pertama di Pantai Wediombo. Penyisiran dilakukan ke arah barat hingga tempat kejadian.

Lalu, titik kedua adalah Pantai Siung. Penyisiran dari titik kedua ini dilakukan ke arah barat hingga radius 500 meter barat tempat kejadian. Kemudian, titik ketiga adalah Pantai Sadeng. "Penyisiran dari titik ketiga ini dilakukan hingga tempat kejadian melalui jalur tengah menggunakan perahu Basarnas," ujarnya,

Korban bernama Sukirin seorang pemancing warga Purwodadi, Tepus sebelumnya datang ke Pantai Jogan untuk memancing ikan. Saat umpan ternakan ikan besar korban berusaha menariknya ke atas tebing. Lantaran tidak kuat korban menuruni tebing untuk mengambil ikan tersebut.

Apesnya setelah sampai di bawah tebing langsung dihanram ombak. Akibatnya korban terseret ke laut dan tenggelam. Upaya pencarian dilakukan namun belum membuahkan hasil. (Bmp)

WARGA KALURAHAN BENDUNG Terima Bagi Hasil Cukai Rp 0,537 Miliar

WONOSARI (KR) - Sebanyak 896 warga Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin dan sekitarnya mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat lewat Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. Penyerahan dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Heri Susanto SKom MSi di Balai Kalurahan, Senin (11/11).

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Administrasi Pemerintahan (Asek I) dr Dewi Irawaty MKes, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Nurudin Araniri, Penewu Semin Haryanto dan sejumlah tamu undangan lainnya. Masing-masing warga menerima Rp 600 ribu sehingga jumlah totalnya Rp 537.600.000,-

"Bantuan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat," kata PLT Bupati Gunungkidul Heri Susanto



KR-Endar Widodo

Plt Bupati serahkan bantuan kepada warga di Balai Kalurahan Bendung - Semin.

to SKom MSi dalam sambutannya.

Sekretaris Dinas Sosial PPPA Nurudin Araniri menjelaskan, bantuan langsung tunai sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengganaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, serta peraturan Bupati Gunungkidul nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Penyaluran melalui beberapa tahap, diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian melalui seleksi kelayakan penerima seperti penerima adalah petani tembakau maupun pekerja di sektor pertanian tembakau dan mereka terdapat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan atau mereka yang melampirkan surat keterangan tidak mampu. (Ewi)

HUJAN DERAS DI PATUK DAN GEDANGSARI Berdampak Longsor dan Talut Ambrol

WONOSARI (KR) -Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Gunungkidul menyebabkan bencana longsor dua lokasi di Gedangsari dan di Kapanewon Patuk. Longsor di Gedangsari terjadi di tebing Jelok hingga material longsor menutup jalan utama. Sedangkan longsor di Patuk terjadi di kompleks Pondok pesantren Al Muhajirin menimpa talut sepanjang 65 meter. "Kedua kejadian longsor tersebut tidak menimbulkan korban," kata Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Purwono, Selasa (12/11).

Informasi di lokasi kejadian menyatakan bahwa bencana longsor di Gedangsari dan ambrolnya talut itu berawal ketika wilayah Kapanewon Patuk dan Gedangsari diguyur hujan deras dengan kurun waktu kurang lebih selama 5 jam.

Sekitar pukul 18.40 WIB, talut sepanjang 65 meter dengan tinggi 3,5 meter itu tidak kuat menahan tanah uruk yang terkena air hujan yang mengakibatkan talut tersebut ambrol.

Diketahui juga bahwa talut yang ambrol itu masih dalam proses pengerjaan, sehingga talut itu belum sempurna dan belum

bisa menahan beban yang terlalu berat karena kobstruksi baru. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. "Talut tersebut sedang dalam proses pengerjaan," ujarnya.

Sementara itu Kapolsek Gedangsari, AKP Suryanto SPd mengatakan terkait dengan longsor di Padukuhan Jelok yang materisnya menutup sebagian jalan sudah mulai teratasi. Warga bersama dan Bhabinkamtibmas telah membersihkan material tersebut sekitar pukul 12.44 WIB. Saat ini, kendaraan roda dua maupun empat sudah dapat melewati jalan dan sudah normal kembali. Namun demikian potensi longsor dengan volume yang lebih besar masih sangat mungkin terjadi jika hujan deras kembali mengguyur. Terkait meningkatnya curah hujan warga diminta meningkatkan kewaspadaan.

Karena Kapanewon Gedangsari menjadi salah satu wilayah yang rawan longsor. "BPBD Gunungkidul dan Klaten juga berencana menjalin kerja sama menyusul potensi tanah longsor di sisi utara wipawayan terbatas ini untuk mengantisipasi potensi bencana, longsor," ujarnya. (Bmp)

SAMPAI NOVEMBER 21 KASUS

Leptospirosis Mengancam 5 Kapanewon

WONOSARI (KR) - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul mengingatkan memasuki musim penghujan masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit, diantaranya Leptospirosis yang sampai bulan November ini ditemukan sebanyak 21 kasus.

Terbanyak di Kapanewon Nglipar, tetapi ada empat kapanewon lain yang rawan teresrang, Semin, Tanjungsari, Tepus dan Karangmojo.

"Media penularan penyakit ini lewat air, sehingga di musim penghujan masyarakat harus lebih waspada dan cepat membawa ke fasilitas kesehatan (faskes) jika ditemukan untuk mencegah terjadinya komplikasi," kata Kepala Dinkes Kabupaten Gunungkidul Ismono SSSI MKes, Rabu (13/11).

Ciri yang menonjol penyakit ini, lanjutnya, demam, nyeri sendi dan otot terutama di betis, air kencing sedikit dan warna keruh seta konjungtiva sufusion/merah. Untuk pencegahan, Dinas Kesehatan sudah meningkatkan kapasitas petugas dan melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) sebagai upaya antisipasi jika terjadi



KR-Endar Widodo

Ismono SSSI MKes

penularan, penyiapan logistik obat dan deteksi dini. Setiap faskes juga sudah menyiapkan obat dan rapid test leptospira sebagai penunjang lebih awal penanganan.

Penyakit menular lain

yang perlu mendapatkan perhatian di musim penghujan ini Demam Berdarah (DBD), flu dan pilek. Meski mulai bulan Agustus kasusnya menurun, 77 kasus, September 65 kasus dan Oktober 46 kasus, tetapi setiap musim penghujan cenderung terjadi peningkatan.

Oleh sebab itu masyarakat diharapkan meningkatkan kebersihan lingkungan, memberantas sarang nyamuk dan membuang semua barang yang bisa menjadi media bertelur nyamuk dan penularan penyakit DBD.

"Bergaya hidup sehat, makan bergizi, olahraga dan istirahat yang cukup," tambahnya. (Ewi/Bmp)

SETELAH DIUJICOBAKAN SEJAK JULI

Diluncurkan Sistem E-Ticketing Retribusi Wisata

WONOSARI (KR) - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Gunungkidul resmikan sistem E-Ticketing berbasis aplikasi MPos dengan kerja sama dengan PT Jasa Raharja Putra Kantor Cabang Yogyakarta Rabu (13/11) kemarin. Dengan sistem ini diharapkan dapat memajukan digitalisasi sektor pariwisata dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan tiket di destinasi wisata di Gunungkidul.

Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul, Oneng Windu Wardana, menyatakan sistem E-Ticketing ini telah melewati fase uji coba sejak Juli 2024 lalu, melalui berbagai proses evaluasi dan perbaikan.

"Dengan dukungan ang-



KR-Bambang Pureanto

Peresmian Sistem E-Ticketing retribusi wisata di Gunungkidul.

garan APBD dan kemitraan bersama Jasa Raharja Putra, proyek ini berhasil menyediakan 28 alat E-Ticketing di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pantai Selatan Gunungkidu," katanya.

Dengan penerapan E-Ticketing ini telah mem-

berikan kontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang telah mencapai Rp 29 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 2 miliar diperoleh melalui aplikasi MPos, dengan rincian Rp1,4 miliar terdiri dari transaksi tunai dan

Rp 600 juta melalui transaksi non-tunai. Ke depan, pihaknya berharap transaksi non-tunai dapat semakin meningkat dengan dukungan sinergi QRIS dan BPD. "Dengan sistem ini diharapkan dapat berdampak signifikan pada peningkatan kualitas layanan pariwisata di Gunungkidul," ujarnya,

Plt Bupati Gunungkidul Heri Susanto, mengatakan digitalisasi pariwisata adalah keniscayaan di era moderen. Sistem ini diharapkan dapat berdampak signifikan pada peningkatan kualitas layanan. Pihaknya akan terus berinovasi dan terbuka terhadap kritik agar pelayanan publik semakin optimal. (Bmp/Ded)

PEMKAB KELUARKAN SURAT EDARAN

Menghadapi Musim Pancaroba dan Bencana Alam

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul mengeluarkan surat edaran (SE) terkait dengan peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan (Pancaroba) yang ditandai dengan cuaca ekstrem dan peningkatan curah hujan berpotensi menimbulkan bencana alam longsor, banjir dan bencana angin.

Surat Edaran tersebut tertuang dalam SE Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul Nomor B/300.2.2/2288/2024 per November 2024 menindaklanjuti peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyatakan Kabupaten Gunungkidul mulai hujan pada Oktober dasarian III hingga November dasarian I dan II.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan dikeluarkannya surat tersebut menindaklanjuti peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyatakan Oktober

dasar III hingga November dasar

ian I dan II sudah musim penghujan. "Musim peralihan ini berpotensi terjadi bencana akibat cuaca ekstrem seperti hujan lebat, banjir, angin kencang, puting beliung, hingga hujan es," katanya.

Kepada Panewu, Lurah, dan masyarakat untuk melakukan langkah mitigasi yakni melakukan gorong royong membersihkan lingkungan dan drainase air yang dimungkinkan tersumbat sampah dan berpotensi terjadinya banjir.

Selain itu SE juga berisi tentang imbauan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu terjadinya banjir dan wabah penyakit. Melakukan pemangkasan pohon yang berisiko terjadinya bencana dan pengecekan rutin aliran listrik, memastikan papan reklame di sekitar masih kuat dan kokoh, maupun melakukan pengawasan wilayah

rawan bencana.

"Kami juga mengimbau kepada BPBD untuk mengaktifkan posko siaga bencana baik di tingkat kalurahan maupun kapanewon," ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunungkidul Purwono menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana cuaca ekstrem. Pihaknya juga memfasilitasi call center yakni di nomor (0274) 294091 dan (0274) 391113, jika terjadi bencana alam agar masyarakat langsung melaporkan kepada petugas. Dari laporan masing-masing wilayah Kabupaten Gunungkidul sejak dasarian kedua bulan ini sudah turun hujan secara merata.

Bahkan di beberapa kapanewon sudah terjadi bencana alam diantaranya longsor dan angin kencang yang berdampak terhadap kerusakan fasilitas permukiman dan jalan umum. (Bmp)

KPK KUNJUNGAN KE KULONPROGO

Penilaian Percontohan Desa Antikorupsi

KOKAP (KR) - Korupsi menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama, dimulai tingkat paling dasar, yaitu kalurahan.

Kegiatan Penilaian Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi sebagai langkah strategis memperkuat budaya antikorupsi di tingkat Kalurahan.

"Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, kalurahan-kalurahan di Kulonprogo diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," kata Pj Bupati Kulonprogo, Ir Srie Nurkyatsiwi saat menerima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Balai Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap,

Selasa (12/11).

KPK kembali berkunjung ke Kabupaten Kulonprogo untuk penilaian percontohan desa anti korupsi.

Srie Nurkyatsiwi mengapresiasi komitmen kalurahan-kalurahan mengikuti program ini, khususnya Kalurahan Hargorejo yang bisa menjadi contoh kalurahan lain untuk memberantas korupsi dari tingkat dasar.

Lebih lanjut diungkapkan, kalurahan yang bersih dari korupsi bukan hanya akan memberikan

manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, tapi juga akan menciptakan lingkungan kondusif. Sehingga Siwi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta mendukung gerakan anti korupsi agar program ini dapat terus berkelanjutan.

"Melalui program ini, kita tidak hanya ingin mencegah dan memberantas korupsi, tapi juga ingin menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran dan tanggung jawab kepada seluruh lapisan masyarakat

kat," tegasnya.

Sementara itu Direktur Pembinaan Iuran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham sebagai Kepala Tim Penilai menjelaskan, Program Desa Anti Korupsi akan dinaikan lagi menjadi Kabupaten/ Kota Anti Korupsi dan hal itu sudah dilakukan di empat Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satunya Kabupaten Kulonprogo.

"Program ini di dasari dari kewaspadaan kami karena adanya indikasi-indikasi penyalahgunaan dana desa yang terus meningkat," ungkap Ariz.

Dijelaskan, sering kali masyarakat desa tidak berani atau tidak peduli untuk melaporkan kasus korupsi di desa. Ariz mengharapkan masyarakat lebih berani dan peduli dalam menindaklanjuti jika memang ada indikasi kasus korupsi di tingkat desa. (Rul)



KR-Asrul Sani

Penjabat Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi MMA (tengah) bersama Ariz Dedy dan jajarannya.